



# RINGKASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa “dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional”. Sehingga perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dengan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto telah menyusun RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 yang akan dijabarkan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen RKPD.

Penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak Tahun 2020 berpedoman pada RPJPD, mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih hasil pilkada serentak Tahun 2020, RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022 dan selanjutnya diproyeksikan menjadi bagian dari RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sehingga proses penyusunan dilakukan secara simultan dan beriringan. Kedudukan RKPD Tahun 2022 merupakan periode pertama dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Skala prioritas pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 pada periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, adalah “mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, makmur, tentram, dan beradab melalui percepatan, pemerataan

pembangunan di segala bidang, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan terkendali, serta memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia”. Sehingga tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah “Mempercepat Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas SDM”.

Penyusunan RKPD juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya dan mempertimbangkan berbagai Kebijakan Provinsi dan Nasional serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah yang selanjutnya diformulasikan melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto. Sehingga, RKPD disusun berdasarkan pola kombinasi pendekatan secara terpadu yaitu pendekatan secara Holistik-Tematik, Spasial dan Integratif. Proses penjaringan aspirasi diharapkan dapat tepat sasaran kepada masyarakat dan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja pemerintah daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembangunan yang mempunyai dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan Kebijakan dan Program Pembangunan dengan sasaran yang terukur;
2. Pembangunan yang sifatnya mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
3. Pembangunan yang realistis untuk dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah;
4. Pembangunan didasarkan pada skala prioritas, bertahap dan konsisten secara terpadu;



5. Pembangunan yang terintegrasi dengan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Pemerintah Provinsi.

RKPD menjadi acuan dan dasar bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sehingga pemerintah daerah diharuskan patuh dan taat dalam menyusun RKPD secara tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan RKPD. Selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022.

## BAB II PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

### Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan berdasarkan urusan atau bidang urusan sebagai berikut:

#### Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
<b>I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>		
1.1	Pendidikan	1. Pengelolaan Sekolah akibat sekolah melalui daring
1.2	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Kebutuhan alat kesehatan dalam penanganan covid-19 sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Jawa Timur</li> <li>2. Kurangnya Kebutuhan logistik dalam penanganan covid-19 sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Jawa Timur</li> <li>3. Capaian desa/kelurahan di Kabupaten Mojokerto yang bebas dari Buang Air Besar sembarangan (ODF) masih rendah yaitu sebesar 68,42 %</li> </ol>
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perlu penambahan pembangunan IPAL/ TPA karena IPAL/TPA yang ada sudah melebihi kapasitas
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draft Perda Penyelenggaraan Pemakaman menyangkut kepentingan banyak pihak sehingga dalam proses pengajuan menjadi Perda banyak ditemui aspirasi baru dan usulan perbaikan</li> <li>2. Terjadi perubahan volume dan spesifikasi sarana air minum yang dibangun menyesuaikan dengan kebutuhan aktual di lapangan. Penyesuaian yang harus didasari dengan kajian dan perhitungan teknis lumayan membutuhkan waktu</li> <li>3. Kesulitan mencari ahli waris keluarga mantan bupati kedua dan ketiga pada saat akan dilakukan pemugaran makam eks bupati dikarenakan tanah makam bukan termasuk asset pemda dan pemkot</li> <li>4. Terdapat kawasan dan lokasi penting seperti sekolah yang membutuhkan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dan kebutuhan perlengkapan keselamatan jalan lain yang perlu dipenuhi</li> <li>5. Kurang aktifnya pengembang untuk menyerahkan PSU ke Pemda</li> <li>6. Tidak ada Kegiatan PISEW tahun 2020 di Kabupaten Mojokerto</li> </ol>
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<p><b>BAKESBANGPOL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terbentuknya FKDM tingkat Desa/Kelurahan</li> <li>2. Kurangnya data dari perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing</li> <li>3. Kurang partisipasi peserta kegiatan dari generasi muda kecamatan se-Kab Mojokerto</li> <li>4. Sulitnya menemui pengurus LSM/ ORMAS saat verifikasi</li> <li>5. Tidak tepat waktu parpol dalam mengajukan bantuan dan pelaporan</li> <li>6. Keterlambatan parpol dalam mengajukan bantuan keuangan dan pelaporannya</li> </ol> <p><b>BPBD</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Jumlah sensor EWS yang dipasang terbatas</li> <li>8. Jumlah Pos Damkar yang hanya 2 unit tidak mampu melayani seluruh wilayah Kab. Mojokerto dalam waktu 15 menit</li> <li>9. Berdasarkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten</li> </ol>





		<p>Mojokerto, terdapat 7 (tujuh) Pos Damkar yang menjadi prioritas pembangunan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Mojokerto untuk dapat memenuhi waktu tanggap 15 menit, namun sampai dengan tahun 2020 jumlah Pos Damkar yang telah terbangun baru 2 unit, yaitu di Kec. Mojosari dan Kec. Mojoanyar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Jumlah bahan/material bantuan bencana masih kurang</li> <li>11. Jumlah anggota TRC yang menangani kejadian bencana masih kurang</li> <li>12. Sebagian anggota Tim JITU PASNA dari OPD teknis yang dikirim bukan pejabat yang membidangi</li> </ol>
1.6	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah PMKS WRSE 7.861, namun yang terbantu setiap tahunnya hanya 15 orang</li> <li>2. Jumlah PMKS pemulung 265 orang, namun yang terbantu hanya 5 orang</li> <li>3. Jumlah PSKS katar 300, yang terentah hanya 7 katar</li> <li>4. Mobilitas kinerja TKSK sangat tinggi, namun untuk kesejahteraan TKSK sangat minim.</li> <li>5. Anak dengan kedisabilitasannya sebanyak 1.045 dan penyandang disabilitas ada 3.925, jadi total penyandang disabilitas ada 4.970 orang, namun yang tersentah dalam setiap tahunnya hanya 25 orang, sehingga tidak sebanding dengan populasi yang ada</li> <li>6. Jumlah pengemis dan gelandangan sebanyak 170 orang, sementara yang terbantu setiap tahunnya hanya 10 orang</li> <li>7. Jumlah anak jalanan sebanyak 106 sedangkan yang terbantu hanya 10 orang</li> <li>8. Mengoptimalkan verifikasi dan validasi data DTKS dengan melakukan koordinasi lintas sektor sebagai dasar penetapan pemberian Bantuan Sosial</li> <li>9. Masih belum optimalnya Shelter (penampungan sementara) Perlindungan untuk para PMKS terutama untuk PMKS T4</li> </ol>
<b>II. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>		
2.1	Tenaga Kerja	Jumlah Pengangguran semakin bertambah seiring dengan belum pulihnya Ekonomi Nasional hingga lingkup kabupaten/kota. sebagai Dampak Pandemi Covid-19, sehingga perlu adanya koordinasi lintas sektor
2.2	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya tempat sampah yang ada di tempat umum</li> <li>2. Terbatasnya jumlah RTH</li> </ol>
2.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya administrasi kependudukan pada data masyarakat miskin yang ada dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga diperlukan koordinasi dan integrasi antara data kependudukan yang pada Dispendukcapil
2.4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kesadaran Pemerintah Desa tentang pentingnya peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</li> <li>2. Belum tercipta komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu yang seharusnya dikomunikasikan. Akibatnya, banyak BUMDes yang strukturnya diisi oleh orang-orang dekat kepala desa atau bahkan keluarganya sendiri</li> <li>3. Banyaknya Penyalahgunaan Dana Bergulir Masyarakat bantuan PNPM – MPd</li> <li>4. Banyaknya Penyalahgunaan Dana Bergulir Masyarakat bantuan UPK PPKM</li> <li>5. Belum optimalnya sosialisasi dan pendampingan Pemutakhiran Data</li> </ol>

		<p>Indeks Desa Membangun (IDM) karena terdapat penambahan parameter dari Kementerian dalam pengukuran indikator tiap tahunnya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Masih banyak desa yang belum memahami peran dan fungsi Lembaga Adat Desa</li> <li>7. Masih belum tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa</li> <li>8. Ada 2 Desa yang tidak mencairkan bagi hasil Pajak dan Retribusi</li> <li>9. Masih banyak desa yang belum tertib dalam pengelolaan asetnya</li> </ol>
2.5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya tingkat kepesertaan KB MKJP serta masih tingginya Unmet Need</li> <li>2. Masih adanya PUS yang tidak ingin anak lagi dan PUS yang ingin anak ditunda (Unmet Need) tapi tidak memakai salah satu alat kontrasepsi di khawatirkan menjadi kehamilan yang tidak diinginkan</li> <li>3. Masih rendahnya peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang : IUD, Implant, MOW, dan MOP) sekitar 29% dari semua metode Ketakutan akan pandemic</li> <li>4. Komplikasi dan kegagalan (terjadi kehamilan walaupun sudah ikut KB)</li> <li>5. Banyak anggota forum anak yang tidak aktif</li> <li>6. Kurang terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Mojokerto</li> <li>7. Banyak kasus KDRT (penelantaran, kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual) dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum), Trafficking, pornografi yang terjadi di Kabupaten Mojokerto</li> <li>8. Banyak gugus tugas PPA desa/kelurahan yang tidak aktif</li> <li>9. Banyak anggota gugus tugas PPA desa yang kurang paham cara penanganan dan pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak</li> <li>10. Kurangnya peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>11. Kurangnya pengetahuan masalah (Tribina) BKB, BKR, BKL oleh kader kelompok Tribina</li> <li>12. Kurangnya pengetahuan tentang tumbuh kembang anak</li> <li>13. Kurangnya pengetahuan tentang perawatan jangka panjang pada lansia</li> <li>14. Kurangnya pengetahuan dan kurangnya partisipasi masyarakat tentang kelompok ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga</li> </ol>
2.6	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya Ijin Siar Radio (ISR) yang dimiliki Radio WIKA</li> <li>2. OPD masih menggunakan pengembang / vendor yang berbeda-beda dan memakai teknologi yang tidak sama</li> <li>3. Tidak semua Subdomain OPD aktif/Subdomain aktif hanya ketika ada kewajiban upload dokumen tertentu sebagai persyaratan pengumpulan</li> <li>4. Implementasi SPBE kurang cepat dan efisien</li> <li>5. Perencanaan dan penganggaran SPBE tumpang tindih dan tidak relevan dengan kebutuhan.</li> <li>6. Adanya disintegrasi Infrastruktur dan sistem aplikasi.</li> <li>7. OPD tidak aktif update dalam Website subdomain</li> <li>8. Tidak aktifnya laporan kecamatan ke Garuda Induk karena media komunikasi tercepat bisa melalui telepon seluler</li> <li>9. Belum tercapainya penerapan Satu Data Kabupaten Mojokerto</li> <li>10. Belum konsistennya data OPD yang satu dengan yang lain</li> <li>11. Belum sinkronnya data menara Diskominfo dengan DMPTSP</li> </ol>



		12. Output kegiatan belum berkembang karena masih terbatas pada Penerimaan Berita Sandi Dan Yg Trsampaikan
2.7	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan klinik bisnis kurang optimal</li><li>2. usaha mikro kesulitan mendapatkan data dari perbankan untuk jumlah realisasi kredit yang tersalurkan pada pelaku usaha mikro</li></ol>
2.8	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam penyusunan project prospectus investasi, terdapat kesulitan didalam identifikasi lahan milik pemerintah kabupaten mojokerto yang clean dan siap di kerjasamakan dengan pihak swasta.</li><li>2. Materi dalam media Informasi investasi adalah buku Project Prospectus serta audio visual mojopahit Haritage, sehingga pelaksanaan agak terlambat karena harus menunggu materi selesai</li><li>3. penyusunan audio visual juga setelah penyusunan projec prospectus selesai</li><li>4. Masih ada perusahaan yang belum paham dengan tata cara pengisian LKPM</li><li>5. Dalam pengajuan pemenuhan komitmen izin lokasi ada kalanya eksisting sudah M37 dan saat diproses ternyata pola ruang yang dimohon tidak sesuai peruntukan</li></ol>
2.9	Kepemudaan dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya pembinaan pemuda dalam pengembangan prestasi pemuda</li><li>2. Kurangnya peran aktif organisasi Kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan</li><li>3. Kurangnya peserta seleksi</li><li>4. Kurangnya minat pemuda untuk berwirausaha</li><li>5. Rendahnya rasa nasionalisme, patriotisme pemuda</li><li>6. Kurangnya sosialisasi/promosi penyelenggaraan lomba</li><li>7. Belum optimalnya pembinaan atlet dalam pengembangan prestasi olahraga</li><li>8. Kualitas dan kuantitas atlet dan pelatih olahraga belum memenuhi standar</li><li>9. Rendahnya kesadaran pengguna fasilitas olahraga dalam menjaga fasilitas olahraga</li></ol>
2.10	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya penyelenggaraan event seni/budaya baik ditingkat daerah maupun luar daerah</li><li>2. Rendahnya minat masyarakat terhadap seni budaya tradisional</li><li>3. Kurangnya motivasi anggota komunitas seni dalam rangka pengenalan seni tradisi baik di kota maupun untuk pentas seni ke luar</li><li>4. Kurangnya sinergi dengan anggota komunitas seni</li><li>5. Kurangnya pengenalan dan pemberdayaan seni/budaya daerah di kalangan pelajar</li><li>6. Kurangnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya</li><li>7. Kurangnya tenaga pendataan dan pengawasan benda cagar budaya/benda diduga cagar budaya</li><li>8. Kurangnya kepedulian masyarakat/generasi muda terhadap kesenian ludruk</li></ol>
2.11	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya, Pemahaman Pentingnya Arsip, Anggaran, SDM, Sarana dan Prasarana untuk Pengelolaan arsip di Perangkat Daerah</li></ol>
2.12	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih terdapat titik titik rawan kecelakaan yang belum tersedia Warning Light</li><li>2. Terdapat beberapa rambu dan perlengkapan jalan yang belum bisa diperbaiki secara menyeluruh</li><li>3. Adanya jukir dan mendapat pekerjaan baru yang meninggal dan</li></ol>



		<p>belum ada penggantinya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Banyak lokasi parkir yang belum dilengkapi sarana perparkiran.</li> <li>5. Jukir dalam melaksanakan tugas belum dilengkapi atribut petugas lapangan</li> <li>6. Sub Terminal Ketapanrame Trawas dalam kondisi rusak</li> <li>7. Kurang aktifnya pengembang untuk menyerahkan PSU ke Pemda</li> </ol>
<b>III. URUSAN PILIHAN</b>		
3.1	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kunjungan wisatawan</li> <li>2. Kurangnya jangkauan promosi untuk obyek wisata daerah</li> <li>3. Belum optimalnya usaha pariwisata</li> <li>4. Terbatasnya data pendukung dalam penyusunan dokumen</li> <li>5. Rendahnya kualitas pelaku usaha pariwisata</li> </ol>
3.2	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bibit Tebu MOJO 01 yang ada masih berumur 3 bulan dan belum layak tanam.</li> </ol>
3.3	Perindustrian dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya tenaga Reparatur yang dibutuhkan</li> <li>2. Masih banyaknya alat UTTP yang belum di tera/tera ulang</li> <li>3. Belum adanya tenaga pengawas PPNS Kemetrolgian</li> <li>4. Kurangnya tenaga pengamat kemetrolgian</li> <li>5. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ulang alat UTTPnya</li> </ol>
<b>IV. URUSAN FUNGI PENUNJANG</b>		
4.1	Administrasi Pemerintahan	<p>BAG. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak format pelayanan yang berbeda tiap kecamatan</li> <li>2. Kurangnya pemahaman Kepala Desa beserta perangkat desa tentang teknis dan pentingnya Pembakuan Nama Rupabumi</li> <li>3. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa</li> <li>4. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa antar kecamatan</li> <li>5. Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang tata cara kerja sama antar daerah dan pihak ketiga</li> </ol> <p>BAG. ORGANISASI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Dengan diundangkannya Permendagri 90/2019 &amp; Kepmendagri 050-3708/2020 terdapat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak selaras oleh SOTK PD di Lingkup Pemerintah Kab. Mojokerto</li> </ol> <p>BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Kelompok kerja yang masih adhoc (tersebar di dinas luar bagian PBJ;</li> <li>8. Belum terbentuknya jabatan fungsional pejabat pengadaan barang jasa</li> </ol> <p>PELAYANAN KECAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Masyarakat kurang informasi terkait pelayanan yang ada di kecamatan</li> </ol>
4.2	Pengawasan	Tahun 2020 pengawasan berbasis resiko dan audit kinerja belum dilaksanakan
4.3	Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suplai data dari masing-masing OPD tidak tepat waktu.</li> <li>2. Pihak pengusul (Desa) sering terjadi miskomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten dan pihak KODIM yang seharusnya usulan disampaikan ke PemKab dan KODIM secara bersamaan.</li> <li>3. Data yang di OPD seharusnya tersedia tapi terkendala oleh mekanisme koordinasi dengan pihak Provinsi klarifikasi dahulu sebelumnya data dirilis(<i>time periode</i>)</li> </ol>
4.4	Keuangan	
4.5	Kepegawaian	

## Isu Strategis Berdasarkan Tema KLHS

No	Tema	Isu Strategis
1.	Infrastruktur	Tata guna dan tata kelola air belum optimal
		Timbulnya limbah padat domestik yang berasal dari aktivitas pasar dan permukiman
		Timbulnya permasalahan drainase di sekitar pasar dan permukiman yang sering mengalami gangguan aliran
		Masih kumuhnya kondisi fisik pasar tradisional dan permukiman
2.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak sebandingnya luas areal sawah di Kabupaten Mojokerto dengan alsintan yang dimiliki Poktan/Gapoktan/UPJA
		Kurangnya fasilitas (kuantitas dan kualitas) jaringan irigasi secara menyeluruh
		Kurangnya pengendalian serangan hama dan bencana banjir
		Lahan semakin menyempit, irigasi mengalami banyak kendala, pupuk dan benih sulit diperoleh, dan harga mahal
		Menurunnya mutu konsumsi pangan
		Penurunan kualitas lahan dengan degradasi sumber daya pertanian (antara lain unsur hara)
3.	Peternakan	Penurunan jumlah peternak dan ternak
4.	Perubahan Iklim	Meningkatnya polusi lingkungan (air, udara, tanah)
5.	Bencana Alam	Sering terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, kekeringan)
		Sering terjadinya kebakaran
6.	Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Melambatnya pertumbuhan ekonomi
		Meningkatnya jumlah penduduk miskin
		Meningkatnya jumlah pencari kerja
7.	Kesehatan	Masih tingginya angka kematian ibu, bayi, penyakit menular, dan tidak menular
		Belum tersedianya pengelolaan limbah medis di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan)
		Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat
8.	Sumber Daya Air	Penurunan kualitas dan kuantitas air
		Menurunnya debit sumber mata air
9.	Pariwisata	Menurunnya kualitas destinasi wisata

### Isu Strategis Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia
- b. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
- d. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
- e. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT.

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pada tahun 2020 dunia sedang mengalami pandemi Covid-19 yang menimbulkan ketidakpastian arah pertumbuhan ekonomi, baik global maupun domestik. Ketidakpastian tersebut memiliki risiko yang sangat tinggi. Sehingga dilakukan berbagai kebijakan penanganan dan pencegahan yang cepat dan tepat untuk fase resesi ekonomi sebagai akibat dampak pandemi Covid-19.

#### **Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Mojokerto**

Kondisi perekonomian secara keseluruhan di setiap daerah dapat dilihat dari besarnya jumlah belanja daerah pada suatu daerah. Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah adalah bentuk rangsangan yang dilakukan pemerintah terhadap perekonomian daerah. Semakin besar nilai belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan, maka akan meningkatkan kesejahteraan penduduk karena belanja pemerintah akan mendorong aktivitas ekonomi produksi dan konsumsi masyarakat, sehingga kondisi ekonomi di daerah tersebut juga akan meningkat. Selain itu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator ekonomi makro yang memberikan kerangka dasar yang dapat digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu kegiatan perekonomian di suatu daerah.

Pada tahun 2020 Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19. Hal ini berdampak kepada perekonomian yang ada di daerah. Kabupaten Mojokerto mengalami dampak pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat Pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,11%. Angka ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi -2,07% dan Jawa Timur yang juga terkontraksi -2,02%. Salah satu penyebabnya adalah berhentinya sektor industri yang memberikan kontribusi lebih dari 53% pertahun, sehingga memukul aktivitas ekonomi daerah. Sektor lain yang memberikan kontribusi besar kontraksi ekonomi adalah sektor jasa lainnya

sebesar -13,82% akibat terhentinya mobilitas penduduk sehingga pengguna jasa turun, disusul kemudian adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang berkontraksi sebesar -13,02% akibat berhentinya aktivitas pariwisata dan kegiatan sosial dan publik lain seperti sekolah dll, kemudian perdagangan besar dan eceran berkontraksi -6,96%, sektor jasa perusahaan sebesar - 6,48% dan sektor konstruksi -6,19%. Struktur ekonomi Mojokerto yang banyak ditopang oleh sektor industri manufaktur memberikan dampak masif terhadap sektor lainnya yang tumbuh dari sektor industri. Data menarik adalah sektor industri manufaktur sendiri ternyata masih mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,16%.

Pertumbuhan sektor industri manufaktur ini sangat menarik, mengingat Kabupaten Mojokerto memang memiliki basis struktur ekonomi yang kuat di sektor industri. Akan tetapi jika dibedah struktur sub sektor industr, maka sebagian besar adalah sub sektor industri makanan dan minuman dan farmasi. Kedua sub sektor ini sangat besar kontribusinya pada penguatan ekonomi sektor industri manufaktur. Hal ini sekaligus memberikan data dasar bahwa sub sektor industri makana dan minuman serta farmasi harus terus dilakukan proses penguatan kebijakan pengembangannya. Sedangkan, untuk sub sektor industri lainnya, maka perlu dilakukan sinkronisasi kebijakan penguatan apakah melalui ketenagakerjaan maupun stimulasi fiskal daerah lainnya. Salah satu paket prioritas paket kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Mojokerto pada sektor industri adalah melalui penguatan sektor industri mikro dan kecil makanan dan minuman serta farmasi. Sub sektor ini akan segera pulih seiring dengan mulai dibukanya aktivitas sosial publik seperti sekolah, ruang terbuka hijau, dan normalisasi pasar daerah dengan protokol kesehatan yang ketat.

Rumusan paket kebijakan percepatan pembangunan ekonomi Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek (urgent) adalah kebijakan yang dilakukan pada tahun anggaran 2021 yang diorientasikan pada pemulihan dan penyelamatan ekonomi, terutama usaha mikro, dan menjaga penyediaan lapangan kerja untuk memenuhi pendapatan hidup masyarakat. Sedangkan, kebijakan jangka panjang adalah Kebijakan yang dilakukan selama 2 - 5 tahun ke depan sampai yang bertujuan untuk membangun pondasi ekonomi daerah dalam mewujudkan pemulihan dan pemberdayaan

sistem produksi ekonomi di daerah, serta membangun sistem kelembagaan ekonomi daerah untuk menjaga kelangsungan hidup pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka menengah dan panjang.

### **Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah Kebijakan Keuangan Daerah merupakan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang akan menggambarkan perkembangan pendapatan dan proporsi sumber pendapatan Kabupaten Mojokerto. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

### **Pendapatan Daerah**

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan produk hukum daerah yang mendasari pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Pelaksanaan pengkajian dan penguatan potensi pengembangan BUMD
- c. Peningkatan Pelayanan Bidang Industri Perdagangan, Pariwisata dan Kesehatan
- d. Peningkatan Pelayanan Perijinan.
- e. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam Bidang Perpajakan.
- f. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Pajak Daerah
- g. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.
- h. Peningkatan Manajemen Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Tehnologi Informasi.
- i. Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah yang bertujuan untuk mendorong implementasi ETPD guna meningkatkan transparansi keuangan daerah serta mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka optimalisasi PAD
- j. Pengembangan transaksi pembayaran digital dan mewujudkan keuangan yang inklusif serta meningkatkan integritas ekonomi dan keuangan digital.



## **Belanja Daerah**

Dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan pemenuhan tuntutan pembangunan, maka perlu diambil langkah-langkah dan kebijakan strategis dalam sisi belanja daerah. Selain itu belanja daerah difokuskan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Langkah dan kebijakan tersebut antara lain:

- a) Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
- b) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
- c) Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
- d) Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
- e) Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.
- f) Pada program dan kegiatan yang termasuk skala besar dan strategis dilakukan penelaahan dan analisa dalam segi waktu pelaksanaan, dalam arti mempertimbangkan waktu yang tepat yang dianggap akan memaksimalkan manfaat dari program atau kegiatan tersebut. Jika berdasarkan pertimbangan dalam berbagai hal perlu dilakukan penundaan atau penjadwalan ulang, maka tidak menutup kemungkinan sebuah program atau kegiatan akan ditunda pelaksanaannya.



## **Pembiayaan Daerah**

Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dipergunakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal, melakukan pembentukan dana cadangan guna mendanai kegiatan yang menyediakan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021.
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Tahun 2022, RKP Tahun 2022 dan PMDN Tentang Penyusunan RKPD 2022 dan diproyeksikan menjadi bagian RPJMD 2021-2026 yang merupakan penjabaran tahun pertama dari tahun rencana yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan kepala daerah selama periode 5 tahun. Penyusunan RKPD merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun lalu. Prioritas pembangunan yang disusun akan dijadikan sebagai kunci dalam penyelesaian permasalahan pembangunan sesuai dengan isu strategis di Kabupaten Mojokerto. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah **Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial** dan memperhatikan Tahapan dan Skala Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-4 (2021-2025) pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 yaitu : **Mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, makmur, tentram, dan beradab melalui percepatan, pemerataan pembangunan di segala bidang, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan terkendali, serta memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia.**

Maka, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menetapkan Rancangan Tema pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah: **Mempercepat Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas SDM**.

## Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

**Visi : 'Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia'**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 1 : <b>Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan</b>	Terwujudnya SDM yg sehat, cerdas, terampil dan produktif yg dilandasi nilai2 keimanan dan ketakwaan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia, seerta pengoptimalan pemanfaatan IPTEK	Harapan Lama Sekolah (HLS),  Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Meningkatkan hard skill dan soft skill berlandaskan etika budaya dan agama melalui fasilitasi aksesdan kualitas pendidikan yang bermutu agar menghasilkan SDM yang cerdas, terampil dan produktif
			Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi covid-19	Angka Harapan Hidup (AHH)	Mengedepankan upaya preventif kesehatan diimbangi dengan upaya kuratif dengan mengupayakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang Sehat
			Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat	Indeks Daya Beli	1. Melakukan upaya untuk menstabilkan harga dan akses masyarakat miskin dan berdaya beli rendah thdp barang2 kebutuhan pokok 2. Melakukan pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tsb diatas dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
			Meningkatnya kualitas pembangunan manusia melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG)	Indeks Pemangunan Gender (IPG)	Melakukan upaya untuk mewujudkan keberpihakan/ advokasi terhadap perempuan dan anak
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	Melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya konflik
Misi 2 : <b>Membangun Kemandirian Ekonomi yang berdimensi Kerakyatan</b>	Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah menuju	PDRB	Upaya pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir , serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	struktur ekonomi yang berorientasi pada agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah		perekonomian daerah		mengutamakan keberpihakan kepada Petani & Masyarakat Pengguna hasil pertanian
			Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism, dll)	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	Upaya pengembangan & fasilitasi sarana & prasarana pariwisata eco-tourism di daerah Pacet & pariwisata sejarah di daerah Trowulan, serta melakukan Branding & Marketing Wisata melalui kolaborasi antar
			Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi	Nilai Realisasi Investasi	Mempermudah layanan perijinan untuk meningkatkan investasi
				Persentase Peningkatan Laba BUMD	
			Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan upaya pemulihan &amp; pengembangan Koperasi Sehat &amp; UMKM yang mandiri, serta hasil produk yang berdaya saing &amp; terserap pasar ml kolaborasi pentahelix pemerintah, masyarakat, swasta, media &amp; akademisi</li> <li>Pemberlakuan kewajiban bagi setiap pelaku usaha makanan dan minuman untuk melakukan sertifikafisi produk makanan dan minumannya, seperti sertifikasi halal</li> </ol>
			Optimalisasi Peningkatan PAD	Rasio kemandirian keuangan	Meningkatkan PAD untuk menekan ketergantungan



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				daerah	terhadap dana Pusat melalui ekstensifikasi dan intensifikasi
		Indeks Gini	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustri	Nilai Tukar Petani (NTP)	Upaya pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir, serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada Petani & Masyarakat Pengguna hasil pertanian
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	Upaya pemetaan kembali kelompok target & penanganan berkelanjutan penduduk desa miskin
		Persentase Penduduk Miskin	Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Upaya pemetaan kembali kelompok target & penanganan berkelanjutan PPKS 2. Melakukan perencanaan pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas
			Penurunan angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1. Pemenuhan lapangan pekerjaan melalui link & match antara kebutuhan supply & demand tenaga kerja, terutama tenaga kerja penganggur 2. Upaya pemenuhan ketentuan lembaga pelatihan kerja; tenaga kerja asing; perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak





Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					tertentu; waktu kerja, termasuk waktu lembur, dan soal waktu istirahat dan cuti; soal upah minimum dan hak serta kewajiban pengusaha dan buruh; dewan pengupahan yang memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah & PHK
Misi 3 : <b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, akuntabel, bersih, transparan</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, akuntabel, bersih, transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya integritas dan profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Upaya peningkatan kinerja ASN yang berintegritas & berkapasitas tinggi berdasarkan sistem merit
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat
			Terwujudnya integrasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi
			Terwujudnya pengutan birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif untuk menghasilkan birokrasi yg akuntabel, bersih & berintegritas
			Meningkatnya pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah	Nilai Opini BPK	Upaya penataan pengelolaan keuangan seluruh OPD2 berdasar standar akuntansi pemerintah
			Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Upaya pengembangan sistem informasi dengan ditunjang sarana & partasaran IT yang memadai



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 4 : <b>Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan</b>	Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase kawasan kumuh Persentase RTLH	Upaya meminimalisasi rumah tidak layak huni & kawasan kumuh
			Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	
			Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Tingkat Keselamatan Transportasi	Upaya mengembangkan keterhubungan transportasi antar pusat-pusat pertumbuhan kecamatan yang aman
			Perluasan ruang terbuka hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Upaya pemanfaatan lahan <sup>2</sup> untuk penghijauan
			Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	IRB (Indeks Resiko Bencana)	Upaya peningkatan kesadaran masyarakat & desa agar sadar akibat bencana alam
			Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur kondisi baik	Upaya meningkatkan kualitas & kuantitas infrastruktur jalan, jembatan & irigasi
			Pembangunan Infrastruktur Strategis	Presentase hasil pembangunan infrastuktur strategis (target ada 2, yaitu Gedung perkantoran Ibukota Kabupaten dan GOR bertaraf internasional)	Upaya Gedung perkantoran Ibukota Kabupaten & GOR bertaraf internasional

## Sinkronisasi Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Pusat mengusung 5 agenda reformasi yang akan dilakukan pada tahun 2022 yakni :

1. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
2. Reformasi Sistem Kesehatan;
3. Reformasi Ekonomi dalam Rangka Penanganan dan Pemulihan COVID-19;
4. Penguatan Sistem Ketahanan Bencana, serta
5. Peningkatan Pencapaian Ekonomi Hijau Melalui Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim;

Agenda reformasi berusaha mengimplementasikan nilai-nilai SDG's yang menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata atau merupakan perwujudan *no one left behind*. 5 agenda reformasi disusun untuk pemulihan kondisi akibat dampak dari wabah covid-19. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyusun Tema pembangunan yang selaras dengan Tema RKP sebagai berikut:

### Persandingan Tema dan Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

TEMA PEMBANGUNAN		
Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Mojokerto
Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro	Mempercepat Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas SDM
Prioritas		
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi sektor usaha mikro, agrobisnis, agroindustry dan pariwisata
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya local	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya local menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi



5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	5. Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik

## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJP Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025, Isu Strategis RPJMD Teknokratik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi daerah maka, Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Daerah disusun sebagaimana dalam tabel berikut:

Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu RKPD 2022 (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	714.203.308.524
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.645.456.116
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	37.557.852.408
	714.203.308.524

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	203.627.021.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	121.807.307.400
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	77.369.714.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.050.000.000
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	550.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	850.000.000
	203.627.021.400

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	176.088.265.475
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.989.910.475
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	77.098.355.000
	176.088.265.475

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	96.556.295.125
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.969.320.325
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	45.586.974.800
	96.556.295.125

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
---	--



PEMERINTAH KABUPATEN  
MOJOKERTO

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	528.995.124.125
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.714.171.560
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	42.249.960.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.798.323.815
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	7.400.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.800.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	38.304.500.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	70.800.000.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	327.078.168.750
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	600.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.150.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-
	528.995.124.125

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.585.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	525.000.000
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.810.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.235.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	110.000.000
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	40.000.000
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	20.000.000
PROGRAM PENATAAGUNAAN TANAH	50.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	17.453.452.477
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.708.452.477
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.745.000.000
	24.148.452.477

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.521.282.484
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.088.813.770
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	760.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	400.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.583.708.714
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	525.000.000
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.141.604.357
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	445.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.243.760.000
	11.521.282.484

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.234.052.338
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.023.052.338
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.211.000.000
	16.234.052.338

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.619.448.491
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.594.448.491
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.225.000.000
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	5.800.000.000
	16.619.448.491





PEMERINTAH KABUPATEN  
MOJOKERTO

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	16.414.347.360
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.481.847.360
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.325.000.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.250.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.907.500.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	450.000.000
	16.414.347.360

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	8.553.657.007
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.652.657.007
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.285.000.000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	735.000.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	881.000.000
	8.553.657.007

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.839.512.556
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.248.512.556
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	-
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.001.000.000
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	210.000.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	380.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.030.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	230.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.100.000.000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	700.000.000
	12.869.512.556

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	36.532.446.773
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.277.446.773
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	375.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.315.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	11.670.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	105.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	230.000.000
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	275.000.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50.000.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	130.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.105.000.000
	36.532.446.773

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.249.918.725
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.534.518.725
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	835.800.000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	389.600.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	490.000.000
	10.249.918.725

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21.346.237.961
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.471.237.961
PROGRAM PENATAAN DESA	250.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	450.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	10.400.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.775.000.000



URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>1.764.245.400</b>
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>310.000.000</b>
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>395.489.000</b>
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>100.000.000</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>100.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>268.267.400</b>
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>590.489.000</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>18.779.153.390</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.281.923.390</b>
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>420.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>9.614.230.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>2.463.000.000</b>
	<b>20.543.398.790</b>

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>26.372.934.945</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.368.834.945</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.400.000
<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>6.450.000.000</b>
Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	75.000.000
<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>11.554.100.000</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>825.000.000</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>825.000.000</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>275.000.000</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>275.000.000</b>
	<b>27.472.934.945</b>

<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>7.093.819.750</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.929.638.750</b>
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>200.000.000</b>
<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>100.000.000</b>
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>609.181.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>350.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>360.000.000</b>
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>545.000.000</b>
	<b>7.093.819.750</b>

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>6.274.151.825</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.176.689.825</b>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>185.000.000</b>
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>165.000.000</b>
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>265.000.000</b>
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>472.462.000</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>10.000.000</b>
	<b>6.274.151.825</b>

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>5.559.456.497</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.956.956.497</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>602.500.000</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>137.500.000</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>107.500.000</b>
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>30.000.000</b>
	<b>5.696.956.497</b>



PEMERINTAH KABUPATEN  
MOJOKERTO

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>4.350.000.000</b>
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>800.000.000</b>
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>3.350.000.000</b>
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>200.000.000</b>
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.350.000.000
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>2.600.000.000</b>
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>400.000.000</b>
<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>350.000.000</b>
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	16.350.890.834
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.450.016.274</b>
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>6.350.874.560</b>
<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>950.000.000</b>
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	75.000.000
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>50.000.000</b>
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>550.000.000</b>
	<b>24.050.890.834</b>

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>58.928.608.967</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>27.775.846.770</b>
Penyediaan Bahan Material	70.600.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.752.000
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>10.855.000.000</b>
DBHCHT - Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau	2.740.000.000
DBHCHT - Penanganan Panen dan Pasca Panen	470.000.000
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>14.038.762.197</b>
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>1.115.000.000</b>
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>1.845.000.000</b>
<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>18.000.000</b>
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>3.281.000.000</b>
DBHCHT - Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Tembakau	960.000.000
	<b>58.928.608.967</b>

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>17.016.436.281</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.477.960.281</b>
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>5.671.525.000</b>
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>150.250.000</b>
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>383.890.000</b>
<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>1.665.030.000</b>
Penyidikan Metrologi Legal	50.000.000
<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>667.781.000</b>
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	100.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.501.265.634
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>1.184.403.634</b>
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	116.862.000
<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>	<b>116.862.000</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKIndan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	116.862.000
<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	<b>200.000.000</b>
<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota</b>	<b>200.000.000</b>
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	200.000.000
	<b>18.517.701.915</b>

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>27.842.144.497</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>27.842.144.497</b>
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-



UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>16.710.000.000</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>16.710.000.000</b>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.937.500
Penyediaan Bahan Material	44.062.500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.000.000
	<b>16.710.000.000</b>

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>15.100.500.000</b>
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>15.100.500.000</b>
	<b>15.100.500.000</b>

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>1.476.475.000</b>
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>1.476.475.000</b>
	<b>1.476.475.000</b>

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>2.965.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>2.965.000.000</b>
	<b>2.965.000.000</b>

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>1.672.100.000</b>
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.672.100.000</b>
	<b>1.672.100.000</b>

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>1.755.000.000</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.755.000.000</b>
	<b>1.755.000.000</b>

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>7.132.111.795</b>
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>7.132.111.795</b>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6.132.111.795
	<b>7.132.111.795</b>

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>3.000.000.000</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.000.000.000</b>
	<b>3.000.000.000</b>

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>735.000.000</b>
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>735.000.000</b>
	<b>735.000.000</b>

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>90.624.903.607</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>50.219.273.607</b>
Penyediaan Bahan / Material	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000.000
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>40.405.630.000</b>
	<b>90.624.903.607</b>



UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>4.329.925.103</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.841.391.103</b>
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>35.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>187.017.000</b>
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	37.017.000
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>45.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>221.517.000</b>
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	87.000.000
	<b>4.329.925.103</b>

UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>3.408.525.105</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.102.511.774</b>
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>36.603.151</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>269.410.180</b>
	<b>3.408.525.105</b>

UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>4.067.310.922</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.748.310.922</b>
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000
Penyediaan Bahan / Material	28.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>50.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>269.000.000</b>
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	95.000.000
	<b>4.067.310.922</b>

UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>3.899.612.667</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.643.612.667</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>24.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>232.000.000</b>
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	37.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	108.000.000
	<b>3.899.612.667</b>

UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>3.822.699.705</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.497.699.705</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>40.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>285.000.000</b>
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	35.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	130.000.000
	<b>3.822.699.705</b>



PEMERINTAH KABUPATEN  
MOJOKERTO

UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>3.800.850.338</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.430.732.978</b>
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>70.117.360</b>
Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	35.058.680
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>300.000.000</b>
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76.000.000
	<b>3.800.850.338</b>

UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>3.228.442.954</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.936.442.954</b>
Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>32.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>260.000.000</b>
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	35.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	115.000.000
	<b>3.228.442.954</b>

UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>3.733.625.145</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.453.625.145</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>30.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>250.000.000</b>
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	40.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	140.000.000
	<b>3.733.625.145</b>

UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>11.389.266.627</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.977.951.627</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000
Penyediaan Bahan / Material	40.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.500.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>35.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>4.101.315.000</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	115.000.000
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>45.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>230.000.000</b>
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000
	<b>11.389.266.627</b>

UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>3.209.929.008</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.919.929.008</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>30.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>260.000.000</b>





PEMERINTAH KABUPATEN  
MOJOKERTO

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	25.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000
	<b>3.209.929.008</b>

UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>4.076.643.773</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.811.643.773</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>35.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	-
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>230.000.000</b>
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	35.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	130.000.000
	<b>4.076.643.773</b>

UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>3.324.922.261</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.104.922.261</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.977.600
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>20.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	-
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>200.000.000</b>
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000
	<b>3.324.922.261</b>

UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>3.182.997.727</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.852.997.727</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>45.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	-
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>285.000.000</b>
	<b>3.182.997.727</b>

UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>3.933.520.990</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.658.520.990</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>35.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	-
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>240.000.000</b>
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	50.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000
	<b>3.933.520.990</b>

UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>3.529.104.517</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.212.742.517</b>
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>35.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>281.362.000</b>

PEMERINTAH KABUPATEN  
MOJOKERTO

3.529.104.517

UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>2.942.334.302</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.672.334.302</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>35.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>235.000.000</b>
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	45.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000
	<b>2.942.334.302</b>

UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>3.320.002.000</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.090.002.000</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>25.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>205.000.000</b>
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	105.000.000
	<b>3.320.002.000</b>

UNSUR KEWILAYAHAN	
<b>KECAMATAN</b>	<b>3.305.093.378</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.047.593.378</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.500.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>47.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>210.500.000</b>
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.500.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	115.000.000
	<b>3.305.093.378</b>

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>20.345.510.977</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14.253.210.977</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>2.688.000.000</b>
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>3.404.300.000</b>
	<b>20.345.510.977</b>

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
<b>PERENCANAAN</b>	<b>14.131.936.844</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.898.247.104</b>
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.585.000.000</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>3.648.689.740</b>
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	40.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	464.689.740
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	30.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	455.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN  
MOJOKERTO

<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>1.200.000.000</b>
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>1.200.000.000</b>
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	250.000.000
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	200.000.000
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>700.000.000</b>
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	125.000.000
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	125.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	200.000.000
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	125.000.000
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	125.000.000
	<b>15.331.936.844</b>

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
<b>KEUANGAN</b>	<b>713.057.791.752</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>128.084.220.054</b>
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	256.450.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.250.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>582.322.158.698</b>
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	49.296.332.883
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>2.651.413.000</b>
	<b>713.057.791.752</b>

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
<b>KEUANGAN</b>	<b>32.779.943.494</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>25.553.376.069</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>7.226.567.425</b>
	<b>32.779.943.494</b>

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>12.142.087.434</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.827.333.434</b>
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>5.314.754.000</b>
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>5.129.000.000</b>
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>5.129.000.000</b>
	<b>17.271.087.434</b>

## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah diperlukan agar dapat mengukur tolok ukur capaian dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Mojokerto. Selain itu juga sebagai bahan untuk mengevaluasi kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Target Capaian indikator Tujuan kemudian menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Mojokerto, dan target capaian indikator sasaran menjadi indikator kinerja daerah yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Berikut adalah Tabel yang merupakan penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mojokerto (Tabel 6.1) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Mojokerto

#### Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mojokerto

No.	Indikator Tujuan	Target Tahun 2022
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,03
2.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	71,88
3.	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,17-4,70
4.	Indeks Gini	0,317
5.	Persentase Penduduk Miskin	9,97
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	70,5
7.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	3,62

#### Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Mojokerto

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
	Fokus Kesejahteraan Sosial	

<b>NO.</b>	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>TARGET CAPAIAN TAHUN 2022</b>
<b>1</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>	
1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5
<b>2</b>	<b>Sosial</b>	
2.1	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20%
ASPEK PELAYANAN UMUM		
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB		
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>	
1.1	Harapan Lama Sekolah	12,90
1.2	Rata-rata Lama Sekolah	8,64
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>	
2.3	Angka Harapan Hidup	72,83
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	
3.1	Persentase Infrastruktur kondisi baik	72,38%
3.2	Persentase hasil pembangunan infrastruktur strategis	n/a
<b>4.</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	
5.1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3.18 % Lokasi kumuh
5.2	Persentase Kawasan Kumuh	0%
<b>5.</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	
5.1	Persentase Penurunan Konflik	100%
5.2	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	100%
5.3	Indeks Resiko Bencana (IRB)	70,5
<b>6</b>	<b>Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan umum, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian</b>	
6.1	Indeks Profesionalisme ASN	81
6.2	Nilai Opini BPK	WTP
6.3	Nikai SAKIP	A



<b>NO.</b>	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>TARGET CAPAIAN TAHUN 2022</b>
6.4	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	30,00%
6.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 (Baik)
6.8	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	70,1
6.9	Persentase Peningkatan Laba BUMD	1,00%
Fokus Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
<b>1</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,2
1.2	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	16,4%
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan masyarakat dan desa</b>	
2.1	Indeks Desa Membangun	0,68
<b>3</b>	<b>Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>	
3.1	Indeks Pembangunan Gender	72
<b>4</b>	<b>Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</b>	
4.1	Nilai IKM Dispendukcapil	B
<b>5</b>	<b>Perhubungan</b>	
5.1	Tingkat Keselamatan Transportasi	6,21
<b>6</b>	<b>Komunikasi dan informatika</b>	
6.1	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6
<b>7</b>	<b>Keperpustakaan dan kearsipan</b>	
7.1	Nilai IKM Perpustakaan dan Arsip	B
ASPEK DAYA SAING		
Fokus Kemampuan Ekonomi		
<b>1</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	
1.1	PDRB	
1.2	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro	0,50%
1.3	Indeks Daya Beli	0,789
<b>2</b>	<b>Penanaman modal</b>	

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022
2.1	Nilai Realisasi Investasi - PMDN (Jutaan Rupiah) - PMA (USD)	3.339.721.880.000
<b>3</b>	<b>Pangan</b>	
3.1	PDRB Kategori Peternakan	6.862.644,60
<b>4</b>	<b>Pertanian</b>	
4.1	Nilai Tukar Petani (NPT)	116,71
<b>5</b>	<b>Perindustrian</b>	
5.1	PDRB Kategori Industri Pengolahan	47.019.003,40
<b>6</b>	<b>Perdagangan</b>	
6.1	PDRB Kategori Perdagangan	9.117.355,00
<b>7</b>	<b>Pariwisata</b>	
7.1	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	2,69%

**KEPALA BAPPEDA**

**KABUPATEN MOJOKERTO**



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



**Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660618 199003 1 011